

**ANALISIS PERANAN WALI KELAS DALAM PENDAMPINGAN BIMBINGAN
DAN KONSELING SERTA DAMPAKNYA
TERHADAP PENANGANAN SISWA BERMASALAH**

Ade Chita Putri Harahap¹, Ella Salsabilla², Sri Rahayu³, Natasya Husna⁴, Zahrani
Ramadhita⁵, M.Farhan Syahreza Ginting⁶
^{1,2,3,4,5,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹adechitaharahap@uinsu.ac.id, ²imelda06052000@gmail.com,
³sri24666@gmail.com, ⁴Natasyahusna0304@gmail.com,
⁵zahraniiramadhita354@gmail.com ⁶Syahginting88@gmail.com,

ABSTRACT

The homeroom teacher can be a primary relation of counselor in dealing with troubled students, because they have full responsibilities in handling students' problems in the class. This study aimed to describe and answer the research question, the role of the homeroom teachers in the maintenance of guidance and counseling in school and its impact on the dealing with troubled students in the founded class. This study can be produced models and troubled student program based education. The design of this research was qualitative research. The approach used was a descriptive case study, with key informants in the study is the homeroom teacher of MAS AL ULUM Medan The results of this study showed that homeroom teacher's role in the maintenance of guidance and counseling were still weakness. It was caused: (1) lack of understanding of the homeroom guidance and counseling, (2) lack of functional communication between counselor and homeroom teachers, (3) lack of guidance and counseling's public services, 4) there were no effort of insentive constructing carried out the headmaster in improving the competence of the counseling teacher, (5) no time classes given to counselor, and (6) there was reference of the regulation books in the school as a standard reference on dealing with troubled students. Consequently, dealing with troubled students held in school tended to use disciplined approach in an allivated effort.

Keyword: *Role of Homeroom Teacher, Guidance and Counseling, Troubled Students.*

ABSTRAK

Wali kelas dapat menjadi relasi utama konselor dalam menghadapi siswa bermasalah, karena wali kelas memiliki tanggung jawab penuh dalam menangani permasalahan siswa di kelas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjawab pertanyaan penelitian, peran wali kelas dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah dan dampaknya terhadap siswa bermasalah di kelas binaan. Kajian ini dapat menghasilkan model dan program pendidikan berbasis siswa bermasalah. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang

digunakan adalah studi kasus deskriptif, dengan key informan dalam penelitian ini adalah wali kelas MAS AL ULUM Medan Tanah Datar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran wali kelas dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling masih lemah. Hal ini disebabkan: (1) kurangnya pemahaman tentang bimbingan dan konseling wali kelas, (2) kurangnya komunikasi fungsional antara konselor dan wali kelas, (3) kurangnya layanan publik bimbingan dan konseling, 4) tidak ada upaya pembinaan insentif dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru bimbingan konseling, (5) tidak ada waktu kelas yang diberikan kepada pembimbing, dan (6) adanya referensi buku peraturan di sekolah sebagai acuan standar dalam menghadapi siswa bermasalah. Konsekuensinya, penanganan siswa bermasalah di sekolah cenderung menggunakan pendekatan disiplin dalam upaya yang diringankan.

Kata kunci: Peran Wali Kelas, Bimbingan dan Konseling, Siswa Bermasalah.

A. Pendahuluan

Peraturan pemerintah tentang tenaga pendidik sebagai tenaga profesional, mengisyaratkan bahwa pekerjaan pendidikan tidak boleh diselenggarakan dengan cara apa adanya. Keprofesionalan pendidik tidak datang dan terlaksana dengan sendirinya, melainkan melalui upaya profesionalisasi sebagaimana telah ditegaskan dalam PP No.19 Tahun 2005 Pasal 28. Ayat 1 yang berbunyi:

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Prayitno (2010: 6) menyatakan guru bimbingan dan konseling (selanjutnya di sebut guru BK) sebagai salah satu profesi pendidik, memiliki peran yang besar sebagai pengampu pelayanan konseling

dalam penyelenggaraan pendidikan. Akan tetapi perlu diingat juga penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah, tidak terlepas dari peranan berbagai pihak di sekolah. Selain guru BK sebagai pelaksana utama penyelenggaraan bimbingan dan konseling, juga perlu melibatkan peran kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, dan staf tata usaha. Menurut Nurihsan (2006: 66) mengatakan:

Wali kelas adalah personel sekolah yang menjadi mitra kerja utama guru BK atau konselor dalam aktivitas bimbingan dan konseling di sekolah.

Dari pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa wali kelas sebagai mitra utama guru BK memiliki peran yang sangat diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling.

Lebih jauh Winkel (1998:182) menjelaskan agar dapat memahami siswa-siswa dengan baik wali kelas perlu menyimpan, mencatat data siswa dan bahan-bahan informasi lainnya ke dalam catatan kumulatif atau catatan-catatan sekolah. Sebagian dari data yang didapat dari

siswa itu sendiri, atau dari orang tua siswanya yang mengisi formulir informasi lisan, dan data lainnya dihasilkan dari pelaksanaan tes atau melalui observasi terhadap kegiatan siswa, kebiasaan, tingkah lakunya baik di dalam kelas, di halaman sekolah maupun di luar sekolah, karena hal ini akan sangat membantu guru BK dalam memahami karakter siswa yang akan mendapatkan pelayanan bimbingan dan konseling dari guru BK.

Selain itu sebagai pengelola kelas tertentu, wali kelas berperan dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling, sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Khusus Bimbingan dan Konseling di MAS AL ULUM Medan sebagai berikut: 1. Membantu guru BK melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Membantu guru mata pelajaran melaksanakan peranannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengikuti layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. 4. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan khusus bimbingan dan konseling, seperti konferensi kasus. 5. Mengalihkan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru bimbingan dan konseling atau wali kelas.

Perlu disadari bahwa kelas adalah masyarakat kecil, di sana duduk siswa-siswa yang merupakan anggota masyarakat, masih terbungkus dalam tubuh yang masih kecil, cara berfikir masih labil, yang

rentan sekali mengalami suatu permasalahan di sekolah. Oleh karena itulah mereka perlu tuntunan, panutan dari sang guru terutama wali kelas. Siswa-siswi yang masih labil tersebut hendaknya harus diarahkan dengan baik dan benar agar kelak mereka mampu menghadapi permasalahan di sekolah maupun di kehidupan masyarakat dengan baik dan mandiri.

Selanjutnya meski saat ini paradigma pelayanan bimbingan dan konseling lebih mengedepankan pelayanan yang bersifat pencegahan dan pengembangan. Namun pelayanan bimbingan dan konseling terhadap siswa bermasalah tetap masih menjadi perhatian, dalam hal ini, perlu diingat bahwa tidak semua masalah siswa harus ditangani oleh guru BK. Oleh karena itulah Willis (2004: 52) mengemukakan ada tiga tingkatan masalah berserta mekanisme dan petugas yang menanganinya yaitu sebagai berikut:

1. Masalah (kasus) ringan. Kasus ringan merupakan pelanggaran ringan yang dialami oleh siswa seperti: membolos, malas, kesulitan belajar pada bidang tertentu, berkelahi dengan teman sekolah, bertengkar, minum-minuman keras tahap awal, berpacaran, mencuri kelas ringan. Kasus ringan dibimbing oleh wali kelas dan guru dengan berkonsultasi kepada kepala sekolah (wali kelas atau guru BK) dan mengadakan kunjungan rumah.

2. Masalah (kasus) sedang. Kasus sedang yang dialami oleh siswa di sekolah seperti: gangguan emosional, berpacaran dengan perbuatan menyimpang, berkelahi antar sekolah, kesulitan belajar, karena gangguan di keluarga, minum minuman keras

tahap pertengahan, mencuri kelas sedang, melakukan gangguan sosial dan asusila. Kasus sedang dibimbing oleh guru BK (wali kelas), dengan berkonsultasi dengan kepala sekolah, ahli atau profesional, polisi, guru dan sebagainya. Dapat pula mengadakan konferensi kasus.

3. Masalah (kasus) berat. Kasus berat yang dialami siswa seperti: gangguan emosional berat, kecanduan alkohol dan narkoba, pelaku kriminalitas, siswa hamil, percobaan bunuh diri, perkelahian dengan senjata tajam atau senjata api. Kasus berat dilakukan referral (alih tangan kasus) kepada ahli psikologi dan psikiater, dokter, polisi, ahli hukum yang sebelumnya terlebih dahulu dilakukan kegiatan konferensi kasus.

Dengan melihat penjelasan di atas, dapat dimaknai bahwa penanganan siswa bermasalah melalui pendekatan bimbingan dan konseling tidak semata-mata menjadi tanggung jawab guru BK di sekolah, tetapi dapat melibatkan pula berbagai pihak lain untuk bersama-sama membantu siswa dalam upaya siswa memperoleh penyesuaian diri dan perkembangan pribadi secara optimal.

Merujuk pada penjelasan tersebut, peran wali kelas sangat diharapkan dalam menunjang kepentingan efektifitas dan efisiensi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Gibson dan Mitchell (2010: 108) menyatakan bahwa:

Wali kelas adalah relasi utama guru BK dalam menjalankan perannya dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah, hal tersebut dikarenakan wali kelas-lah yang memiliki intensitas kontak harian lebih besar dari para personel sekolah lainnya, sehingga memungkinkan wali kelas yang seharusnya lebih paham

akan kondisi dan kebutuhan siswa yang berada dalam kelas binaannya.

Pernyataan ini, diperkuat dengan fakta yang peneliti temukan melalui pengamatan di lapangan bahwa, intensitas kontak pribadi harian guru BK di MAS AL ULUM Medan dengan para siswa belum maksimal, yang mengakibatkan pengetahuan pribadi guru BK terhadap kebutuhan siswa akan konseling terbatas. Fakta lain yang terlihat koordinasi yang terjadi antara guru BK dan personel sekolah belum berjalan secara ideal, yang ditandai dengan kepala sekolah sering memberikan tugas di luar dari kewenangan tugas guru BK. Dalam hal ini, guru BK umumnya melaksanakan tugas dari kepala sekolah. Tugas-tugas tersebut diantaranya pencatat pelanggaran siswa seperti, siswa yang berkelahi, tidak memakai seragam lengkap, bolos dan tidak mengikuti upacara bendera.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dan memfokuskan masalah penelitian lebih mengenai bagaimana peran wali kelas dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di MAS Al Ulum Medan serta dampaknya terhadap penanganan siswa bermasalah.

Merujuk pada fenomena dan penjelasan tersebut, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran wali kelas dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di MAS Al Ulum Medan serta dampaknya terhadap penanganan siswa bermasalah di kelas binaan

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan rancangan pendekatan studi kasus. Menurut Yusuf, (2013: 343) penelitian studi kasus adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif, holistik dan sistematis tentang orang, kejadian, latar sosial atau kelompok dengan menggunakan bermacam teknik serta sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana orang, kejadian, latar alami itu beroperasi dengan konteksnya. Mengacu pada pengertian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang peran wali kelas dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling serta dampaknya terhadap penanganan siswa bermasalah di kelas binaan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah wali kelas di SMAN 1 Pariangan.

Lebih jauh Emzir (2010: 20) menyatakan pengambilan informan di dilakukan dengan cara *purposive sampling* untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan menjadi informan penelitian, pemilihan informan harus didasarkan pada kemampuan mereka memberikan kontribusi pemahaman tentang fenomena yang akan diteliti (sampling intensitas).

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Kemudian dari data yang didapat dicek dengan teknik pemeriksaan data yang didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Yusuf (2013: 396) ada empat kriteria untuk menguji

keabsahan data melalui (1) uji Kepercayaan, (2) uji Keteralihan, (3) uji Defendibilitas (4) uji Konformitas.

Selanjutnya Moleong (1994: 102) menyatakan dari data yang terkumpul dilakukan proses mengatur urutan data, mengorganisasi-kannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Mengacu pada pernyataan tersebut, maka untuk dapat mengatur urutan data ke dalam suatu pola Yin (2008: 140) menjelaskan untuk penelitian kasus, strategi analisis yang tepat digunakan adalah analisis dominan, yang terdiri dari, analisis penjodohan pola, analisis penjelasan dan analisis deret waktu.

Dalam proses pelaksanaan analisis yang dominan tersebut peneliti membandingkan antara pola yang didasarkan atas empiri dengan pola yang diterapkan di SMAN 1 Pariangan, lalu dari hasil membandingkan pola tersebut peneliti menyajikan temuan kasus yang berkenaan dengan peran wali kelas dalam bentuk teks naratif selanjutnya peneliti menelusuri serangkaian kegiatan yang menyebabkan keterlaksanaan program bimbingan dan konseling sampai dengan kebijakan kepala sekolah yang mengarah pada peran kepala sekolah dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Temuan Penelitian Peran Wali kelas dalam penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat digambarkan bahwa, peran wali kelas dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di MAS AL ULUM Medan

belum terlaksana dengan optimal. Masih ada diantara lima aspek peran wali kelas yang belum dilaksanakan oleh wali kelas yang menjadi informan utama penelitian. Peneliti menyusun materi pertanyaan dengan berpedoman pada pedoman khusus pelaksanaan bimbingan dan konseling yang dikeluarkan oleh Depdiknas pada tahun 2004 yang mewakili lima aspek peran wali kelas dalam bimbingan dan konseling di sekolah.

Pada wali kelas X.2, ada beberapa perannya dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan, akan tetapi kegiataannya belum begitu terencana dan terprogram secara baik. Wali kelas melaksanakan perannya dalam bimbingan dan konseling hanya pada peran yang dianggap perlu dan bersifat urgensi saja. Jika tidak terlalu mendesak, maka wali kelas tidak akan melaksanakan perannya dalam bimbingan dan konseling.

Begitu juga dengan wali kelas XI IPS.1, peran wali kelas sebagai salah satu anggota utama penyelenggara bimbingan dan konseling sudah ada yang terlaksana, tetapi belum sepenuhnya berjalan. Hal yang menjadi penyebabnya, karena wali kelas XI IPS.1 berpendapat bahwa, guru BK seyogyanya bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Hal ini disampaikan, wali kelas XI IPS.1 pada saat memberi keterangan mengenai perannya dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling.

Di sisi lainnya juga terlihat bahwa, wali kelas berasumsi memasyarakatkan atau mensosialisasikan dan menyelenggarakan bimbingan dan

konseling adalah tugas penuh dari guru BK, bukan tanggung jawab dari wali kelas maupun guru mata pelajaran.

Lebih jauh, dari data temuan penelitian mengenai peran wali kelas baru tergambar, pada aspek wali kelas membantu guru BK dalam menangani penyelesaian masalah siswa, yang menyangkut dengan pelanggaran tata tertib. Seperti berkelahi, merokok bolos dan pelanggaran tata tertib lainnya, wali kelas XII IPA.2 termasuk wali kelas yang kurang optimal terlibat dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah.

Hanya beberapa kegiatan yang dilakukan dari lima komponen inti peran wali kelas dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang mewakili setiap aspek pelaksanaan peran wali kelas, dijawab belum pernah dilakukan karena wali kelas XII IPA.2 berpendapat bahwa hal tersebut adalah kewajiban guru BK, bukan menjadi kewajiban wali kelas. Peran wali kelas XII IPA.2 yang terlaksana pada saat, memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengikuti atau menjalani kegiatan bimbingan dan konseling. Dari apa yang dikemukakan oleh wali kelas XII IPA.2, tampak bahwa lemahnya pemahaman wali kelas mengenai perannya dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling, sehingga menimbulkan pendapat bahwa bimbingan dan konseling hanya ditujukan kepada siswa yang bermasalah dalam hal disiplin saja. Selain itu kurangnya komunikasi fungsional antara wali kelas dan guru

BK, turut serta berakibat pada kekeliruan pemahaman wali kelas terhadap kegiatan bimbingan dan konseling.

Keterangan yang peneliti dapat dari guru BK, menjelaskan bahwa lemahnya pemahaman wali kelas, mengenai perannya dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penyelenggaraan bimbingan dan konseling belum berjalan secara optimal. Karena keberadaan wali kelas sebagai pembina kelas sangat berperan penting dalam upaya penanganan permasalahan siswa, sebab wali kelas merupakan guru yang memiliki intensitas waktu lebih besar dibandingkan dengan personel sekolah lainnya dalam berinteraksi dengan siswa di kelas. Hal ini, jelas membuka kesempatan kepada wali kelas untuk lebih memahami karakter siswanya secara mendetail, dibandingkan dengan personel sekolah lainnya.

Dalam hal ini, seyogyanya wali kelas telah memiliki banyak informasi mengenai masing-masing pribadi siswanya. Jika hal tersebut didukung dengan pemahamannya terhadap perannya dalam bimbingan dan konseling. Maka akan lebih mudah mewujudkan fungsi dan perannya dalam merencanakan, mempersiapkan dan memberikan kemudahan bagi siswa untuk mendapatkan pelayanan dari guru BK, dengan begitu, maka program bimbingan dan konseling di sekolah seyogyanya akan dapat terlaksana dengan optimal.

Namun di sisi lain secara tersirat, guru BK juga merasa begitu sulit menyelenggarakan bimbingan dan konseling di sekolah karena situasi

dan lingkungan sekolah yang kurang begitu mendukung, mulai dari fasilitas, sistem sampai dengan lemahnya dukungan dari para personel sekolah dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Sehingga guru BK harus bekerja ekstra bukan hanya memasyarakatkan dan memahami siswa mengenai tujuan, fungsi, manfaat dan manajemennya pelayanan bimbingan dan konseling. Namun juga pada personel sekolahlainnya terutama kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru ataupun wali kelas itu sendiri.

Selain itu guru BK di MAS AL ULUM Medan juga mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan siswa, karena guru BK tidak mendapatkan jam masuk kelas, ditambah lagi dengan sikap guru BK yang cenderung pasif dalam kegiatannya bimbingan dan konseling. Sehingga guru BK tampak hanya menunggu siswa yang bermasalah, melalui rekomendasi dari wali kelas atau personel sekolah lainnya.

Hal yang mendasar yang peneliti pahami, mengapa peran wali di MAS AL ULUM Medan belum terlaksana secara optimal, ternyata salah satu faktor yang menyebabkannya hal ini terjadi, adalah karena kurangnya pemahaman wali kelas dan guru BK mengenai konsep pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Mulai dari kegiatan, manfaat, fungsi dan tujuan dari penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Sehingga muncul pemikiran bahwa peran wali kelas hanya sekedar mengecek daftar kehadiran siswa dan mengisi rapor dan peran wali kelas dalam bimbingan dan konseling hanya sekedar memberikan informasi atau keterangan mengenai siswa yang

memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling dari guru BK.

Melihat dari faktor lainnya, pihak sekolah juga belum berupaya secara maksimal dalam segi sosialisasi, secara khusus dari guru BK kepada guru-guru atau personel sekolah, ataupun rapat interen untuk memberikan pengarahan, mengenai konsep dan program penyelenggaraan bimbingan dan konseling mulai dari fungsi, tujuan, manfaat dari penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah, baik dari guru BK ataupun kepala sekolah. Selanjutnya dari hasil observasi dan wawancara dengan kepala sekolah, diperoleh keterangan bahwa, permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya pelaksanaan peran wali kelas dalam bimbingan dan konseling, seperti akar permasalahan masih kembali pada alasan keterbatasan dana operasional sekolah untuk mengupayakan peningkatan kompetensi guru BK melalui kegiatan-kegiatan seminar atau sosialisasi yang sering diadakan oleh ABKIN atau perguruan tinggi di Sumatera Barat.

Berdasarkan data yang terkumpul dan setelah dianalisis, dapat dikategorikan bahwa, peran wali kelas dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di SMAN 1 Pariangan belum berjalan optimal, yang disebabkan oleh: (1) kurangnya pemahaman wali kelas mengenai bimbingan dan konseling, (2) lemahnya komunikasi fungsional antara guru BK dan wali kelas, (3) tidak ada jam masuk kelas yang diberikan oleh kepala sekolah, (4) kurangnya pemasyarakatan pelayanan bimbingan dan konseling, (5) belum adanya upaya pembinaan

yang dilakukan kepala sekolah dalam

meningkatkan kompetensi guru BK. (6) Adanya acuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sekolah Sekolah (KUHPs) dalam penanganan siswa bermasalah.

Selain itu temuan penelitian di lapangan, pada umumnya wali kelas dan guru BK dalam proses penanganan siswa bermasalah lebih banyak menggunakan pendekatan disiplin, yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sekolah (selanjutnya disingkat KUHPs). Dengan penerapan pola tersebut pada tingginya jumlah siswa yang dikeluarkan dari MAS AL ULUM Medan atau dengan kata lain direkomendasikan pindah mencari sekolah lain.

Dari penuturan wali kelas yang peneliti peroleh, dalam proses penanganan siswa bermasalah di sekolah, wali kelas umumnya selalu mengacu pada KUHPs dalam penanganan siswa bermasalah. Apabila siswa mengalami masalah dalam bidang disiplin maka wali kelas akan menasehati siswa dan tetap mencatat pelanggaran siswa sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa sesuai dengan rujukan yang di gunakan di MAS AL ULUM Medan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan ditemui berbagai fenomena yang menambah wawasan dan pengetahuan, serta keyakinan atas teori-teori yang dikaji pada penelitian ini. Agar hasil penelitian ini mudah untuk dipahami berikut dijelaskan berdasarkan fokus penelitian.

1. Peran wali kelas dalam penyelenggaraan bimbingan dan

konseling di MAS AL ULUM Medan.

Dari temuan penelitian di lapangan, terungkap bahwa peran wali kelas dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di MAS AL ULUM Medan masih terdapat beberapa peran wali kelas yang belum terlaksana secara optimal. Hal ini ditandai dengan belum terlaksananya pola penyelenggaraan bimbingan dan konseling, yang telah dirumuskan oleh depdiknas tahun 2004 dalam panduan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di SMA dengan benar, masih terdapat banyak kelemahan peran wali kelas dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di MAS AL ULUM Medan. Mengingat pentingnya peran wali kelas dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling, oleh karena itulah seyogyanya wali kelas, harus memahami perannya dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling, sebagaimana yang dikemukakan oleh Gibson dan Mitchell (2010:111) peran wali kelas sebagai pendukung program konseling harusnya dapat memberikan kontribusi dalam memberikan siswa-siswa yang membutuhkan bimbingan dan konseling. Karena idealnya wali kelas harus mampu, menjadi barisan pertama kontak antara siswa dan program bimbingan dan konseling di sekolah.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gibson dan Mitchell, Natawidjaja (1988: 1) menyatakan bahwa: Pada dasarnya program bimbingan dan pelayanan bukan hanya dilaksanakan oleh konselor sekolah saja, melainkan semua tenaga pendidik yang bertugas di sekolah memiliki fungsi dan

peranannya masing-masing dalam rangka pelaksanaan program bimbingan tersebut, dalam hal ini termasuk guru dan terutama bagi wali kelas. Pendapat tersebut di atas juga didukung oleh pendapat Sukardi, (2008: 90) yang menyatakan, wali Kelas sebagai guru yang diberi tugas khusus disamping mengajar untuk mengelola status kelas siswa tertentu dan bertanggung jawab membantu kegiatan bimbingan dan konseling di kelasnya.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa agar penyelenggaraan peran wali kelas dalam bimbingan dan konseling dapat berjalan secara optimal. Pemahaman dan komunikasi wali kelas dengan guru BK harus berjalan dengan baik guna terciptanya kerja sama antara seluruh personel sekolah dalam mewujudkan penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang bermanfaat bagi semua siswa.

2. Faktor yang menyebabkan lemahnya peran wali kelas dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di MAS AL ULUM Medan.

Dari hasil penelitian, terungkap bahwa, ada beberapa faktor yang mempengaruhi peran wali kelas dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling, yaitu: (1) kurangnya pemahaman wali kelas mengenai BK, (2) lemahnya komunikasi fungsional antara guru BK dan wali kelas, (3) kurangnya pemasyarakatan pelayanan bimbingan dan konseling, (4) belum adanya upaya pembinaan yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru BK, (5) tidak ada jam masuk kelas yang diberikan oleh kepala sekolah dan (6) adanya acuan "KUHPS" sebagai acuan standar penanganan siswa bermasalah, yang merupakan

faktor pengambat penyelenggaraan bimbingan dan konseling di MAS AL ULUM Medan.

Menurut Nurihsan (2007: 56) bimbingan dan konseling sebagai bagian dari proses pendidikan sekolah, tidak akan mungkin mencapai sasarannya apabila tidak memiliki program yang bermutu, dalam artian tersusun secara jelas, sistematis, dan terarah. Oleh karena itu, maka seyogyanya dalam program tersebut harus terdapat unsur-unsur pokok personel yang terlibat di dalam kegiatan- kegiatan yang diselenggarakan.

Selain itu di sekolah MAS AL ULUM Medan guru BK tidak mempunyai jam khusus masuk kelas, maka sebisa mungkin guru BK seyogyanya bekerja sama dengan wali kelas dalam memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling di samping juga berupaya memanfaatkan media secara kreatif untuk memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Lebih lanjut Yusuf LN (dalam Supriatna 2011: 68) menjelaskan bahwa personel sekolah termasuk di dalamnya wali kelas sangat besar perannya dalam memperlancar penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah.

Pembinaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dengan adanya upaya berupa bimbingan, pengawasan dan dorongan. Sahertian (2009: 19) menjelaskan tujuan pembinaan adalah untuk memberikan pelayanan dan bantuan dalam meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada muaranya meningkatkan kualitas belajar siswa. Lebih jauh, Depdiknas (2004) menegaskan bahwa tanggung

jawab pembinaan guru adalah berada di tangan pembina, adapun pembina yang dimaksud adalah kepala sekolah selaku penanggung jawab pelaksanaan teknis bimbingan dan konseling di sekolahnya.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah sangat dituntut untuk mampu melakukan pembinaan kepada para personel sekolah dalam upaya untuk meningkatkan mutu sekolah yang dipimpinnya. Supaya semua personel sekolah dapat meningkatkan kompetensi yang sangat berguna dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dan tujuan sekolah.

3. Dampak peran wali kelas terhadap penanganan siswa bermasalah dalam bimbingan dan konseling.

Berdasarkan hasil temuan khusus penelitian, pada umumnya wali kelas dan guru BK dalam penanganan siswa bermasalah lebih banyak menggunakan pendekatan disiplin yang mengacu pada "KUHP" yang berakibat pada tingginya jumlah siswa yang dikeluarkan atau dengan kata lain direkomendasikan pindah mencari sekolah lain.

Tingginya jumlah siswa, yang dikeluarkan di MAS AL ULUM Medan, salah satu penyebabnya karena wali kelas belum begitu memahami dengan baik perannya dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Selanjutnya rendahnya pemahaman guru BK mengenai konsep pendekatan bimbingan dan konseling juga berakibatnya pada penerapan pola penanganan siswa bermasalah yang dilaksanakan kurang sesuai dengan mekanisme yang benar.

Dengan penerapan pola penanganan siswa bermasalah yang cenderung menggunakan pendekatan disiplin, yang mengacu pada KUHP, mengakibatkan pada tingginya jumlah siswa yang dikeluarkan dari sekolah. Seyogyanya pola penanganan siswa bermasalah, hendaknya dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: Seorang siswa yang bermasalah atau melanggar tata tertib dapat ditindak oleh kepala sekolah, tindakan tersebut diinformasikan kepada wali kelas yang bersangkutan.

Sementara itu guru BK berperan dalam mengetahui dan latar belakang permasalahan yang menyebabkan siswa tersebut melakukan pelanggaran. Dalam hal ini seharusnya guru BK melakukan tindakan dengan menggunakan pendekatan bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan sumber data, setelah wali kelas merekomendasikan kepada guru BK. Dengan menggunakan pendekatan persuasif, harusnya sebisa mungkin guru BK berusaha untuk membangun hubungan konseling yang hangat (*rapport*) kepada siswa.

Glading (2012: 148) menjelaskan tahap pertama yang dari proses konseling adalah mencakup keterampilan membangun hubungan dan memfokuskan diri untuk mendapat partisipasi klien dalam mengeksplorasi klien, dan adanya motivasi klien untuk berubah.

Apabila guru BK sudah mampu melakukan hal ini (membangun *rapport*) maka sangat kecil sekali kemungkinan pengambilan keputusan mengeluarkan siswa atau mengembalikan siswa kepada orangtua. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mendidik anak menjadi lebih

baik, oleh karena itu di sekolah sangat mungkin ditemukan siswa yang bermasalah, dengan menunjukkan berbagai gejala penyimpangan perilaku yang merentang dari kategori ringan sampai dengan berat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudrajat, (diakses 7 Januari 2013) upaya untuk menangani siswa yang bermasalah, khususnya yang terkait dengan pelanggaran disiplin sekolah dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu: (1) pendekatan disiplin dan (2) pendekatan bimbingan dan konseling.

Penanganan siswa bermasalah melalui pendekatan disiplin yang merujuk pada aturan dan ketentuan (tata tertib) yang berlaku di sekolah beserta sanksinya. Sebagai salah satu komponen organisasi sekolah, aturan (tata tertib) siswa beserta sanksinya memang perlu ditegakkan untuk mencegah sekaligus mengatasi terjadinya berbagai penyimpangan perilaku siswa. Kendati demikian, harus diingat sekolah bukan lembaga hukum yang harus mengobrol sanksi kepada siswa yang mengalami gangguan penyimpangan perilaku. Sebagai lembaga pendidikan, justru kepentingan utamanya adalah bagaimana berusaha menyembuhkan segala penyimpangan perilaku yang terjadi pada para siswanya.

Senada dengan penjelasan tersebut Prayitno (2012: 13) menjelaskan bahwa: Pendekatan bimbingan dan konseling, berbeda dengan pendekatan disiplin yang memungkinkan pemberian sanksi untuk menghasilkan efek jera, penanganan siswa bermasalah melalui bimbingan dan konseling justru lebih mengutamakan pada upaya penyembuhan atau

pengentasan dengan menggunakan berbagai pendekatan persuasif dengan memanfaatkan keahlian guru BK atau konselor dalam menggunakan teknik umum dan khusus yang ada dalam proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling.

Mengingat pentingnya penggunaan pendekatan bimbingan dan konseling dalam upaya pengembangan kemandirian siswa. Maka seyogyanya kerja sama antara guru BK dan wali kelas merupakan keharusan. Karena dalam hubungan fungsional kemitraan antara wali kelas, guru mata pelajaran dan guru BK. Oleh karena itulah dalam upaya penanganan siswa bermasalah di kelas, guru BK hendaknya menyiapkan program bimbingan dan konseling yang tepat dalam upaya penanganan siswa bermasalah. Salah satu kegiatan yang bisa di upayakan adalah membuat model pendekatan bimbingan dan konseling untuk pengentasan siswa bermasalah, sehingga wali kelas dan guru BK tidak hanya mengacu pada pendekatan disiplin, yang merujuk pada aturan tata tertib sekolah dalam upaya pengentasan siswa bermasalah. Adapun dampak hasil penelitian ini mengenai upaya penanganan siswa bermasalah di MAS AL ULUM Medan salah satunya adalah membuat model pendekatan bimbingan dan konseling dalam upaya pencegahan dan pengentasan siswa bermasalah di kelas binaan.

Adapun dampak hasil penelitian ini mengenai upaya penanganan siswa bermasalah di MAS AL ULUM Medan salah satunya adalah membuat model pendekatan bimbingan dan konseling dalam upaya pencegahan dan pengentasan siswa bermasalah di

kelas, adapun program bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut:

1. Program I: Model Pendekatan Bimbingan dan Konseling Dalam Penanganan Siswa Bermasalah di Kelas

a. Latar Belakang

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Peran wali kelas dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah serta dampaknya terhadap penanganan siswa bermasalah di kelas binasaan", didapatkan bahwa. Peran wali kelas belum berjalan secara optimal sesuai dengan pedoman khusus pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, hal tersebut disebabkan karena, (1) kurangnya pemahaman wali kelas mengenai BK, (2) lemahnya komunikasi fungsional antara guru BK dan wali kelas, (3) kurangnya pemasyarakatan pelayanan bimbingan dan konseling, (4) belum adanya upaya pembinaan yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru BK, (5) tidak ada jam masuk kelas yang diberikan oleh kepala sekolah dan, (6) adanya acuan KUHPs sebagai acuan standar penanganan siswa bermasalah. merupakan faktor pengambat penyelenggaraan bimbingan dan konseling di MAS AL ULUM Medan.

Dengan terjadinya kondisi tersebut, akibatnya penanganan siswa bermasalah di kelas jarang sekali terselesaikan dengan baik. Pelayanan bimbingan dan konseling yang merupakan salah satu komponen utama dari kurikulum pun kurang dimanfaatkan dengan baik dalam upaya pengentasan masalah siswa. Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan bagian yang integral dalam

pendidikan yang menjadi tugas dan tanggung jawab guru BK dalam penanganan siswa bermasalah. Oleh karenanya, wali kelas dan guru BK sebagai personel sekolah yang mempunyai peran penting dalam pelayanan bimbingan dan konseling, hendaklah memberikan bantuan kepada siswa dalam mengatasi permasalahan siswa, dalam hal ini diharapkan kepada wali kelas guru BK dan personel sekolah untuk tidak hanya berfokus pada pendekatan disiplin saja dalam mengatasi siswa bermasalah. Sehingga dari temuan penelitian ini, hendaknya wali kelas, guru BK, kepala sekolah dan semua personil sekolah di MAS AL ULUM Medan untuk bekerja samamenerapkan pendekatan bimbingan dan konseling dalam penanganan siswa bermasalah.

b. Tujuan

Wali kelas dan guru BK diharapkan dapat menggunakan pendekatan bimbingan dan konseling dalam penanganan siswa bermasalah.

c. Perencanaan Kegiatan

Sebelum kegiatan dilakukan, diperlukan perencanaan yang matang terlebih dahulu, di antaranya:

- 1) Lama kegiatan sekitar: 90 menit atau 1 jam pembelajaran (1 jam pembelajaran setara 45 menit)
- 2) Sasaran kegiatan adalah: semua personil sekolah.
- 3) Jenis kegiatan, kegiatan dapat dilakukan dengan pemberian layanan informasi
- 4) dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok.

- 5) 4) Format kegiatan, kegiatan dapat dilakukan dengan menggunakan
- 6) beberapa format yaitu: 1) format individual, 2) format kelompok, dan 2) format klasikal yaitu melayani sejumlah wali kelas dalam satu kelas.
- 7) Materi kegiatan adalah: informasi
- 8) mengenai peran wali kelas dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling dan upaya pendekatan bimbingan dan konseling dalam mengatasi permasalahan siswa.
- 9) Alat bantu buku pedoman khusus pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal dan buku pedoman khusus bimbingan dan konseling di sekolah menengah atas.
- 10) Tempat, dapat digunakan ruangan kelas, atau ruangan guru.
- 11) Pelaksana, dilaksanakan oleh konselor atau guru BK dengan mengundang narasumber lainnya yang berkompeten.

d. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada perencanaan kegiatan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin atau insidental. Volume dan waktu untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan konseling di dalam kelas dan di luar kelas diatur oleh guru pembimbing dengan persetujuan pimpinan sekolah. Guru pembimbing dalam hal ini berpartisipasi secara aktif dengan melibatkan personil sekolah lainnya. Kegiatan program dicatat dan dilaporkan pelaksanaannya.

e. Penilaian Kegiatan

Penilaian hasil kegiatan dapat dilakukan melalui: 1) Penilaian segera (LAISEG), yaitu penilaian untuk mengetahui perolehan siswa

yang dilayani; 2) Penilaian jangka pendek (LAIJAPEN), yaitu penilaian dalam waktu tertentu (satu sampai dengan satu bulan) untuk mengetahui dampak layanan/kegiatan terhadap siswa. 3) Penilaian jangka panjang (LAIJAPANG), yaitu penilaian dalam waktu tertentu (satu bulan sampai dengan satu semester) untuk mengetahui lebih jauh dampaknya terhadap siswa.

Dari pemaparan program tersebut, dapat disimpulkan bahwa, penanganan siswa bermasalah dengan menggunakan pendekatan bimbingan dan konseling secara profesional, diharapkan dapat menekan tingginya jumlah siswa yang dikeluarkan. Oleh karena itulah, guru BK seyogyanya harus mampu menyelenggarakan proses bimbingan dan konseling secara professional tanpa harus menggunakan pendekatan disiplin dalam pengambilan sanksi kepada siswa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan analisis penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran wali kelas dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di MAS AL ULUM Medan belum berjalan secara optimal. Masih ada beberapa peran wali kelas dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang belum mengacu pada pola depdiknas tahun 2004.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan peran wali kelas dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling adalah: (a) lemahnya pemahaman wali kelas mengenai perannya dalam bimbingan dan konseling. (b) kurang berjalannya komunikasi fungsional antara guru BK dan wali kelas, (c) kurang optimalnya upaya pemasyarakatan yang dilakukan oleh guru BK, (d) belum adanya upaya pembinaan yang intensif oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru BK, (d) tidak ada jam khusus yang diberikan oleh kepala sekolah. (e) adanya acuan standar Kitab Undang-undang Hukum Pidana sekolah yang di tetapkan oleh sekolah dalam penanganan siswa bermasalah.
3. Kurang berjalannya peran wali kelas dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di MAS AL ULUM Medan yang didasari oleh wali kelas belum sepenuhnya memahami perannya dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling. dan berdampak pada kerja sama antara wali kelas dan guru BK dalam penanganan siswa bermasalah belum berjalan secara
4. optimal, hal ini mengakibatkan pada tingginya jumlah siswa yang dikeluarkan dari sekolah serta siswa kurang mengenal manfaat pelayanan konseling bagi siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas, 2004. *Pedoman Khusus Bimbingan dan Konseling di SMA*. Jakarta:
- Yusuf. A. Muri. 2013. *Metode Penelitian*. Jakarta: Depdiknas.
- Glading, Samuel T. 2012. *Konseling Profesi yang Menyeluruh*. Terjemahan oleh Winarno Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Padang: UNP Press.
- Winarno dan Lilian Yuhono. Jakarta: PT. Indeks.
- Yusuf. A. Muri. 2011. *Asesmen dan Evaluasi*
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendidikan: Pilar Penyedia Informasi dan Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moleong. Lexy J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Natawidjaja. Rochman 1988. *Peranan Guru dalam Bimbingan di Sekolah*. Bandung: Abardin.
- Nurihsan. A. Juntika. 2007. *Bimbingan dan Konseling Dalam Berbagai Latar Kehidupan*. Bandung: Refika Aditama
- Prayitno. 2010. *Modul Kedua Pendidikan Profesi Pendidik: Pendidik Profesional*, Padang: UNP Press.
- , 2010. *Modul Ketiga Pendidikan Profesi Pendidik: Aktivasi Energi Pembelajaran*, Padang: UNP Press.
- , 2012. *Seri Panduan Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*. Padang. UNP Press.
- SMAN 1 Pariangan. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sekolah*. Tanah Datar: Provinsi Sumatera Barat.
- Yin. Robert K. 2008. *Studi Kasus; Desain dan Metode*. Terjemahan oleh M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudrajat, Akhmad 2008. *Penanganan Siswa-Bermasalah di Sekolah*. [Online], (http://www.Akhmadsudrajat.worpress.com/2008/07/08/penanganan_siswa_bermasalah, diakses 20 Desember 2012).
- Sukardi. D. Ketut 2008. *Pengantar Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriana, Mamat. 2011. *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi Orientasi Dasar Pengembangan Profesi Konselor*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Willis, Sofyan S. 2004. *Konseling Individual; Teori dan Praktek*. Bandung : Alfabeta.
- Winkel. W.S. 1998. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Jakarta: PT. Gramedia.